

PENDIDIKAN ISLAM DAN MUNCULNYA GERAKAN SOSIAL ISLAM INDONESIA

Aniek Rahmaniah*

Abstract

Since the New Order regime collapsed in 1998, the face of Indonesian Islam became increasingly complex. This is because the various manifestations of Islam in Indonesia, both as a political force as well as social and strength. The complexity of Islam after the New Order was also more pronounced because the process of development and change in terms of thought and forms of movement. In addition, Indonesian Islam witnessed the birth of the new educated middle class well to intensive contact with the ideas of modernity. Thanks to the development of Islamic educational institutions, the Muslims whether they are socio-cultural background and traditional and modern religious alike have the opportunity to tap into a new pattern of Indonesian life.

Keyword: *Islamic education, state, politic, social movement*

Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan sebagai negara muslim terbesar di dunia. Namun, Islam seringkali menjadi sasaran kecurigaan dari negara. Negara mencurigai Islam dalam manifestasinya sebagai kekuatan politik. Sementara itu, banyak kalangan di lingkungan gerakan Islam berpandangan bahwa Islam sebagai kekuatan politik juga berhak untuk menjalankan peran politik. Namun selama masa pemerintahan Orde Baru, Islam tidak pernah diizinkan untuk mengekspresikan dirinya sebagai sebuah kekuatan politik formal. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masa pemerintahan Orde Baru ditandai oleh ketegangan antara negara dan Islam.

Tanda-tanda perubahan dalam hubungan antara negara dan Islam mulai terlihat sejak akhir dekade 1980-an ketika rezim Orde Baru memperluas basis dukungan di luar militer dan Golkar. Hal ini mulai mengubah pandangan mengenai peran Islam dalam masyarakat Orde Baru, dan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok gerakan Islam. Perubahan ini misalnya ditandai oleh terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

* Dosen P.IPS Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No 50 Malang 65144

(ICMI) pada akhir tahun 1990. Memasuki dasawarsa 1990-an tampak bahwa negara mulai melakukan pendekatan dan rekonsiliasi dengan Islam.

Terlepas dari proses ketegangan dan rekonsiliasi antara negara dan Islam selama pemerintahan Orde Baru, suatu hal yang patut menjadi catatan adalah kemampuan arus besar (*mainstream*) Islam Indonesia untuk tetap eksis tanpa harus terlalu tergantung kepada negara. Meskipun negara di bawah kendali Orde Baru berhasil memangkas peran politik Islam -sebagai kekuatan dalam masyarakat- Islam terus berkembang sebagai sumber nilai. Organisasi-organisasi Islam terus memainkan peran signifikan sebagai organisasi kemasyarakatan, dengan dukungan dan akar yang kuat dalam masyarakat, di berbagai kegiatan sosial dan pendidikan.

Meskipun punya kesamaan posisi dalam tatanan politik negara, Islam di Indonesia bukanlah kekuatan yang monolitik. Pluralitas dan keberagaman menjadi karakteristik utama Islam di Indonesia. Deskripsi umum terhadap Islam di Indonesia kerap merujuk kepada karakteristik adanya dua aliran besar (*school of thought*), yakni Islam Modernis dan Islam Tradisionalis. Namun, sejak berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998, dan dimulainya era keterbukaan politik dan demokratisasi, penggambaran Islam di Indonesia dalam simplikasi modernis-tradisionalis tidak lagi mencerminkan realitas sebenarnya yang semakin kompleks.

Berakhirnya tekanan dan pembatasan politik oleh negara telah membuka ruang bagi proses manifestasi berbagai ragam gerakan dan pemikiran dalam komunitas Islam Indonesia. Hal ini antara lain ditandai oleh kelahiran berbagai partai politik yang secara formal mengusung ideologi dan cita-cita Islam. Kelahiran berbagai partai politik berbasis Islam, merupakan wujud dari kembalinya Islam sebagai kekuatan politik, meskipun keberadaan partai-partai politik Islam ini tetap diwarnai oleh derajat pluralitas dan keberagaman yang tinggi. Disamping kelahiran kembali Islam politik, kehidupan Islam di Indonesia juga ditandai oleh dua fenomena tampilnya berbagai gerakan-gerakan sosial dan kelahiran organisasi-organisasi Islam baru.

Bagaimanakah pendidikan Islam di Indonesia memunculkan lahirnya gerakan sosial? Siapakah yang menjadi aktor di belakang kelahirannya? Faktor-

faktor apa yang mendorong lahirnya kelompok intelektual muslim Indonesia? Konteks sosial dan politik seperti apa yang mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan umat Islam Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini, akan menjadi pokok bahasan tentang pendidikan Islam dan munculnya gerakan sosial umat Islam Indonesia.

Pendidikan Islam: Pesantren, Madrasah, dan PTAIN

Eickelman, etc. (1999) mengatakan lembaga-lembaga pendidikan dan mass media memiliki peranan penting di dalam proses transformasi masyarakat beragama, khususnya dalam konteks bagaimana masyarakat itu membangun persepsi tentang agama dan politik. Lembaga-lembaga pendidikan –yang juga berarti literasi- telah membuka cakrawala baru melalui informasi-informasi yang ditawarkan mass media. Oleh karena itu, jika modernitas juga meliputi kemunculan dan pengakuan akan adanya ruang publik, maka tak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini tengah terjadi transformasi besar di kalangan masyarakat muslim. Munculnya diskusi yang intensif di kalangan masyarakat muslim tentang tema-tema demokrasi, hak-hak asasi manusia, *civil society*, kesetaraan gender, dan sebagainya tidak hanya merupakan indikator semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan lancarnya arus informasi. Lebih dari itu, juga merupakan petunjuk semakin menguatnya ruang publik di kalangan masyarakat Islam.

Dalam konteks Islam Indonesia, kehadiran organisasi keagamaan Islam dan modernisasi pendidikan Islam yang berlangsung sejak awal abad ke-20 jelas memainkan peran penting dalam membentuk kelompok sosial yang disebut intelektual muslim. Pada masa Orde Baru, modernisasi pendidikan Islam telah melahirkan ‘kelas menengah santri baru’. Modernisasi pendidikan Islam yang berlangsung dalam berbagai arena dan level mulai pesantren, madrasah, sampai perguruan tinggi Islam semakin mengalami intensifikasi. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan *mass education* merupakan pra kondisi bagi munculnya kelompok intelektual muslim yang berjuang untuk demokrasi, *civil society*, kesetaraan gender, dan sebagainya.

Pesantren, lembaga pendidikan Islam tertua yang bercorak tradisional, telah mengalami transformasi sebagai lembaga pendidikan modern. Pesantren bahkan mampu menjadi jembatan bagi tampilnya kalangan muslim terpelajar generasi baru yang akrab dengan tema-tema modernisasi. Sampai akhir abad ke-19, sejalan dengan semakin terpisahnya kelompok priyayi (aristokrasi) dengan kelompok muslim yang disertai dengan kemunculan lembaga-lembaga pendidikan modern, pesantren menempatkan dirinya sebagai penjaga ortodoksi Islam. Pada dekade 1920-an pesantren bahkan semakin meneguhkan dirinya sebagai lembaga pendidikan bagi kelompok muslim tradisional.

Namun, pada awal abad ke-20 pesantren mengalami perubahan-perubahan penting sebagai akibat interaksinya dengan sistem pendidikan Belanda, dan munculnya gerakan pembaruan Islam. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan tokoh-tokoh pembaruan Islam untuk membangun lembaga pendidikan Islam modern, pada perkembangannya menjadi inspirasi bagi kalangan pesantren untuk melakukan pembaruan pendidikan dengan mengadopsi sistem pendidikan modern madrasah. Pesantren di Indonesia kemudian muncul menjadi lembaga pendidikan yang sangat beragam, yaitu pesantren tradisional dan pesantren modern. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa di dalam kedua jenis pesantren tersebut pada perkembangan kontemporer dapat dijumpai lembaga-lembaga pendidikan Islam modern, seperti madrasah dan sekolah, bahkan perguruan tinggi. Dipandang dari segi ideologi keagamaan, pesantren juga menawarkan keragaman. Tetapi pada umumnya pesantren Indonesia menawarkan paham keagamaan yang bersifat moderat.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak pernah surut, pesantren terus bertambah jumlahnya dan tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia, dengan berbagai modifikasi sebagai implikasi dari interaksinya dengan sistem pendidikan modern. Pertumbuhan pesantren seiring dengan pendirian madrasah-madrasah modern di lingkungan pesantren, kemudian menjadi faktor penting munculnya intelektual muslim dengan orientasi baru.

Madrasah mengalami perkembangan serupa, tidak hanya menawarkan mata pelajaran Islam, madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan modern yang sama dengan sekolah umum. Sejak awal kemunculannya, madrasah di Indonesia

didirikan kelompok-kelompok masyarakat sehingga lembaga pendidikan ini punya tradisi panjang sebagai lembaga pendidikan yang mandiri. Sebelum kemerdekaan dapat dipastikan bahwa madrasah merupakan lembaga yang tidak memiliki keterkaitan dengan penguasa. Setelah kemerdekaan, madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lain berada di bawah Kemenag (Kementerian Agama), lembaga pemerintah yang memiliki otoritas dalam modernisasi madrasah di Indonesia. Melalui Kemenag inilah pemerintah mendorong modernisasi pendidikan Islam.

Dewasa ini berdasarkan undang-undang pendidikan, istilah madrasah sudah menjadi nomenklatur pendidikan nasional Indonesia dengan definisi baru. Madrasah didefinisikan sebagai ‘sekolah umum berciri khas agama Islam’, sebuah definisi yang dimaksudkan sebagai langkah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan modern. Penyebutan madrasah secara eksplisit di dalam undang-undang No. 20 tahun 2003, penting digarisbawahi mengingat ini merupakan preseden baru. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran, yang merupakan undang-undang pendidikan pertama, tidak secara eksplisit menyebut madrasah. UU tersebut hanya menyebut ‘sekolah agama’ yang di dalamnya tidak hanya mencakup pesantren dan madrasah, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan agama secara keseluruhan. Hal ini mengandung arti bahwa madrasah telah sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional yang pada tingkat tertentu berarti madrasah telah menjadi lembaga pendidikan modern. Munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan modern merupakan pintu masuk bagi masyarakat muslim untuk meningkatkan taraf pendidikan secara umum.

Pada tingkat perguruan tinggi, yang menjadi tempat para alumni pesantren dan madrasah melanjutkan pendidikan, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) memiliki peran strategis. IAIN bahkan muncul sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang menjadi pilihan alumni pesantren, terutama pesantren yang menolak mengikuti ujian persamaan negeri. Beberapa pesantren, sebagai akibat resistensinya terhadap negara yang sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda, menolak intervensi negara, terutama dalam materi dan substansi pengajaran di pesantren. Dalam posisi demikian, IAIN merupakan perguruan

tinggi Islam yang penting di Indonesia. Kehadirannya tidak hanya memfasilitasi masyarakat Islam dalam mendapatkan pendidikan tinggi, lebih dari itu juga telah ikut mendorong perubahan-perubahan sosial keagamaan di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang bisa dicatat, seperti diungkapkan Steenbrink, IAIN ikut mengubah latar belakang pemimpin agama di Indonesia, termasuk ulama, dari semula tamatan pesantren yang bergelar ‘kyai haji’ menjadi tamatan perguruan tinggi Islam IAIN yang bergelar ‘Drs’. (Karel Steenbrink: 1986). Pada tingkat tertentu ini merupakan indikasi perubahan dari pola kepemimpinan berdasarkan kewibawaan tradisional menjadi pola kepemimpinan berdasarkan rasionalitas sebagai simbol kewibawaan modern. Belakangan ini transformasi beberapa IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), menunjukkan semakin terintegrasinya pendidikan Islam dengan modernitas.

Berkat perkembangan lembaga pendidikan Islam –disamping aspek-aspek penting lain- Islam Indonesia menyaksikan lahirnya satu kelas menengah santri baru yang terpelajar (*well educated new middle class*), yang sangat intensif bersentuhan dengan gagasan-gagasan modernitas. Mereka memasuki lapangan baru dalam kehidupan Indonesia modern, dalam jajaran birokrasi, pekerja profesional, dan kalangan intelektual muslim. Dalam konteks ini, kaum muslim baik mereka yang berlatarbelakang sosial budaya dan keagamaan tradisional maupun modern sama-sama memperoleh kesempatan untuk memasuki jenjang modern dan akhirnya memasuki pola kehidupan Indonesia baru.

Hingga sekarang, IAIN telah memproduksi sekelompok intelektual muslim yang telah memberi kontribusi penting dalam pembentukan wacana keislaman dan keindonesiaan. Nama-nama intelektual muslim berpengaruh di Indonesia rata-rata berasal dari IAIN misalnya: Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, Muslim Abdurahman, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Bahtiar Effendi, Saiful Mujani, Jamhari. Tentu saja tidak semua intelektual muslim di Indonesia adalah alumni IAIN. Tidak dapat dipungkiri bahwa wacana tentang keislaman dan keindonesiaan juga mendapat kontribusi dari kelompok-kelompok intelektual muslim dari universitas-universitas umum. Nama-nama seperti M. Amien Rais, A. Syafi’i Ma’arif, Imaduddin Abdurrahim, Dawam Rahardjo, dan nama-nama lain

adalah alumni universitas-universitas umum. Akan tetapi nama-nama tersebut memiliki persentuhan dan kaitan erat dengan organisasi-organisasi Islam.

Pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan IAIN yang mengalami modernisasi merupakan faktor utama yang menjadi daya dorong terbentuknya kelompok sosial yang disebut intelektual muslim. Mereka ini yang disebut dengan santri baru –karena memiliki latar belakang santri- tampil ke ruang publik dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan pandangan para pendahulu mereka. Perbedaan tersebut, terutama terletak pada beberapa hal diantaranya menyangkut masalah orientasi politik. Berbeda dengan santri lama yang masih terikat pada politik aliran, dimana penegasan simbol-simbol dan teks Islam politik (*political Islam*) menjadi agenda utama perjuangan, santri baru lebih berorientasi pada Islam kultural (*cultural Islam*) yang menekankan substansi dan fungsionalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan Indonesia modern. Untuk itulah dalam pandangan santri baru, gerakan Islam harus diarahkan pada penguatan basis intelektual dan budaya agar masyarakat muslim mampu dengan mudah memasuki kehidupan modern Indonesia.

Gerakan Sosial

Dari sudut teori gerakan dalam kajian Islam pada garis besarnya gerakan sosial dapat digolongkan dua pendekatan. Pertama, adalah pengikut “*the new orientalism*”, yang melihat munculnya gerakan Islam sebagai wujud dari pengaruh karena adanya tafsiran baru mengenai ajaran agama. Sehingga suatu gerakan muncul dianggap bermula dari ide dan gagasan keagamaan, yaitu selalu ada seorang tokoh yang kharismatik dengan tiba-tiba gagasan ke-Islamannya mempunyai pengaruh besar untuk melakukan perubahan dan pembaharuan. Oleh karena itu, para pendukung gerakan ini diikat oleh komitmen terhadap paham tertentu yang menjadi legitimasi dan tujuan, serta merumuskan konsep dan bentuk gerakan dalam situasi politik dan ekonomi yang mereka hadapi. Kedua, mereka yang berasal dari kalangan “*the new social history*”, melihat munculnya kesadaran kolektif di kalangan Islam lebih bermula dari pertanyaan sosiologis, mengapa suatu gerakan itu muncul? Meskipun dalam retorika dan idiom-idiom gerakan itu menggunakan Islam, namun bagi kalangan ini yang penting harus dipahami,

apakah ada kekuatan sejarah baru yang sungguh-sungguh menggerakkan di balik kemunculannya. Sebab, suatu gerakan meskipun –mengatasnamakan Islam– namun sesungguhnya faktor yang kuat adalah karena perasaan bersama tentang perlunya menghimpun diri untuk suatu kepentingan sosial, ekonomi atau politik.

Dengan genealogi intelektualnya dua pendekatan tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti untuk memahami karakteristik munculnya suatu gerakan Islam. Studi yang menekankan pengaruh ide Islam sebagai kekuatan yang menggerakkan telah menghasilkan perspektif secara produktif yang membantu mengenali dan menjelaskan, bagaimana peranan Islam dalam pergulatan politik tertentu. Atau, bagaimana budaya dan norma-norma keagamaan telah menjadi inspirasi perubahan, baik secara gradual maupun radikal. Dalam revolusi Iran, misalnya, kajian ini telah menjelaskan bagaimana ajaran dan militansi *Shi'i* telah berhasil ditransformasikan dari watak mesianistik menjadi kekuatan revolusioner yang berhasil. Selain itu juga menjelaskan, bagaimana peranan ulama disana telah berubah secara radikal dari otoritasnya sebagai pemegang tradisi berubah menjadi pelaku politik yang populer di era modern. Sedangkan bagi para sejarawan sosial yang kritis, hasil-hasil kajian mereka sangat berarti untuk memperkaya wawasan sejarah yang menjelaskan munculnya gerakan-gerakan Islam tidak dari segi yang sifatnya doktrinal, namun menempatkan peranan budaya dalam pilihan-pilihan sosial yang sangat rumit dan menjadi motivasi ideologis, mengapa gerakan protes dan kesadaran kolektif muncul.

Dalam perkembangan diskursus ilmu-ilmu sosial, kedua pendekatan tersebut sebenarnya tidak lagi memiliki batas yang jelas. Sudah terjadi tumpang tindih dan konvergensi di antara mereka. Namun demikian sebagai aliran akademik, corak dan komitmen intelektualnya masih dapat dibedakan. Mereka yang percaya terhadap kekuatan ide sebagai pengubah sejarah (*Islam as normative system*), lebih mementingkan diskursus elite dalam mengenali dimana letak pengaruh suatu gerakan. Sementara yang percaya bagaimana Islam yang aktual ada dalam penghayatan sehari-hari, lebih tertarik memahami budaya rakyat (*the study of popular culture*) sebagai ekspresi yang riil, suatu titik yang menjadi perjumpaan bagaimana budaya yang bersifat semi-otonom (di kalangan bawah, buruh dan petani) memiliki potensi perlawanan politik.

Tokoh sejarah seperti George Rude, Eric Hobsbawn, dan Edward Thompson, sejak tahun 50-an telah mengungkapkan bahwa gerakan-gerakan perlawanan kaum bawah, khususnya di Eropa yang terjadi sejak abad ke-18 mempunyai akar yang kuat dalam tradisi dan budaya setempat. Termasuk perasaan yang bersumber dari agama tentang rasa ketidakadilan, yang kemudian oleh para sejarawan disebut sebagai *a moral economy*. Dengan sudut pandang untuk melihat ‘sejarah dari bawah’ ini, mulailah berkembang kajian-kajian yang lebih kritis untuk melihat gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat Islam, tentang gejala yang sama, yakni munculnya kesadaran massa yang berakar dari persoalan keresahan sosial yang dikatakan merupakan *an Islamic moral economy*, sekedar untuk menyebut bahwa kekuatan sejarah seperti itu juga pernah terbentuk sebagai pengalaman sosiologis kaum muslimin.

Secara faktual bahwa modernitas telah menghasilkan *fragmentasi* sosial bahkan globalisasi lebih digerakkan oleh kapital daripada ide kesadaran kolektif-telah menjadi sumber kekhawatiran yang meluas. Terutama apakah kemerdekaan sosial masih bisa diatasi misalnya oleh aksi-aksi sosial yang baru, dan bukan semata-mata menyerah terhadap logika pasar. Selain harus diakui bahwa pada masyarakat paska-industri dengan kompleksitasnya lebih dibentuk oleh basis konsumsi dan ilmu pengetahuan ketimbang modal produksi, masalah yang lebih menonjol adalah soal konflik dalam mencari model kultural ketimbang isu tentang bagaimana mencari model ekonomi atau redistribusi sosial dalam rangka menjawab kemiskinan dan marginalisasi masyarakat. Dalam wacana ideologi neo-liberalisme, seolah-olah evolusi sejarah telah diterima berjalan seperti apa mestinya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya tanpa ada kepercayaan lagi bahwa ada kekuatan transformatif sosial (*social its self-transformative capacity*), yang bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan dari lapisan masyarakat bawah, untuk mengubah nasibnya sendiri. Gerakan-gerakan sosial tampaknya lebih peduli memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai *issue as citizen* dan *as consumer* menghadapi kapitalisme global daripada memperjuangkan nasib orang-orang yang menderita sebagai *as a worker* atau *as under-class citizen* (Abdurrahman: 2010).

Globalisasi tidak sekedar nama bagi berubahnya sejarah kapital atau munculnya suatu *epoch* baru dalam kehidupan umat manusia serta munculnya biografi negara-negara kebangsaan. Namun arus ini juga ikut mengubah imajinasi dalam kehidupan sosial itu sendiri. Dalam kaitan ini, imajinasi global yang paling suram dan tetap saja belum terselesaikan adalah persoalan bahwa belahan dunia yang paling besar dan dihuni oleh masyarakat khususnya kaum muslimin hidup dalam kefakiran, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana mereka dapat mengubah kesejahteraan hidupnya. Inilah ruang imajinasi sosial kemanusiaan yang seolah-olah kosong, tanpa harapan dan dalam ruang seperti ini banyak gagasan-gagasan yang kadang-kadang ditawarkan sebagai ilusi (termasuk misalnya jika *sharia* dilaksanakan maka selesailah semua masalah kemiskinan ini). Keadaan seperti ini -sebagian juga bisa menerangkan tentang munculnya radikalisme di negara-negara Islam- khususnya di Timur Tengah, bahwa setelah mereka merdeka dan memiliki kesadaran nasionalismenya masing-masing, melalui imajinasi politik baru yang disebut sosialisme Arab, sesungguhnya harapan mereka yang miskin tentang redistribusi sosial sebagai mekanisme mewujudkan keadilan sosial di kalangan masyarakat Islam bisa dilaksanakan. Tapi, memerangi kapitalisme yang *un-human* ternyata lebih berat ketimbang imperialisme yang opresif, maka beberapa kalangan muda yang terdidik dan kritis terhadap pengaruh materialistik kapitalisme global terpaksa memimpin gerakan perlawanan atas nama solidaritas Islam dan muncullah apa yang oleh media Barat akhirnya digambarkan sebagai bahaya fundamentalisme Islam.

Namun apakah *social in-equalities* bisa diselesaikan dengan cara-cara resistensi sektarianistik? Inilah suatu tantangan tatkala Islam sebagai utopian harus menghadapi kenyataan sejarah bahwa soal-soal kemanusiaan kontemporer, seperti kemiskinan, degradasi lingkungan dan meningkatnya budaya kekerasan dimana-mana mempunyai kompleksitas secara global dan tidak mungkin akan diselesaikan sendiri-sendiri. Dalam menghadapi ancaman kemanusiaan seperti itu, sangat dibutuhkan pentingnya kesadaran baru yang dapat mengkonsolidasikan semua kekuatan alternatif yang sifatnya lebih transenden secara humanistik. Artinya kalau tidak mungkin lagi menghidupkan kesadaran ideologi yang bersifat totalistik, paling tidak harus ditumbuhkan kesadaran pedagogi dalam pengertian

kolektif, agar tumbuh kekuatan *globalization from below* sehingga hakekat globalisasi yang positif seperti *freedom of choice and justice* tidak hanya digerakkan oleh *the state-capital nexus*, namun juga menjadi milik yang sah bagi mereka yang tertindas oleh hegemoni.

Sumber-sumber opresi sesungguhnya tidak hanya kemiskinan dan kefakiran, di luar itu ada soal seksualitas, politik, ras dan etnisitas serta soal lingkungan hidup. Tapi persoalan ketimpangan sosial antara yang kaya dan miskin, sungguh serius melebihi apa yang sering digambarkan oleh analisa kelas tentang perjuangan kaum proletar terhadap borjuasi dalam ruang modal produksi. Jurang perbedaan antara kaya dan miskin telah melebar dalam geografi regional, nasional bahkan membelah warna geografis dunia. Dan inilah wajah dehumanisasi yang telah diwariskan oleh janji-janji modernitas yang ternyata menyingkirkan sebagian besar penduduk dunia ke sudut-sudut marginalisasi dan membuat mereka pasif, seolah-olah mereka ini sebagai warga dunia tanpa melakukan peran sejarah (*the people without history*).

Menggagas munculnya gerakan sosial untuk menghadang hegemoni secara komprehensif tentu tidak realistis, apalagi memikirkan untuk membuat utopian dari sebuah model masyarakat ideal yang akan dijadikan sebagai cetak biru untuk dilaksanakan. Di bawah keadaan *the hyper-modernity*, dimana kehidupan tidak lagi berpusat pada negara dan politik, namun pada uang dan *pleasure*, teknologi dan perang, dan orang lebih disatukan dalam konsumerisme, maka sesungguhnya unsur yang paling rendah ialah hilangnya rasa *community* atau semangat berjamaah sebagai pijakan solidaritas sosial. Sebagai lokus hermeneutik Islam yang baru, kata dan makna *community* sedang diperebutkan diantara yang menginginkan sebagai *sign* untuk melanggengkan hegemoni dan yang memperjuangkan *counter-hegemony*. Kekuatan pasar sangat sulit untuk dilawan secara total, tapi ada beberapa norma negatif yang harus ditolak misalnya yang berwatak *impersonal freedom, egoism, exclusivity* dan *a want-regarding institution*. Dengan konsep berjamaah sebagai basis komunitas Islam, sesungguhnya kita ingin menegakkan kembali semangat *community* tersebut di atas nilai dan pilar tentang tanggung jawab sosial (*a social obligation*) yang semakin pudar.

Pendidikan Islam dan Gerakan Sosial

Intelektual muslim lulusan lembaga-lembaga pendidikan, pada umumnya terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial, baik dalam bentuk organisasi sosial-keagamaan, maupun organisasi sosial seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ini bukan hanya merupakan implikasi dari pergeseran pemimpin keislaman dari ulama ke intelektual muslim, tetapi lebih dari itu juga merupakan indikasi semakin pentingnya alumni lembaga-lembaga pendidikan Islam. Para alumni ini menentukan wacana keagamaan di tempat-tempat mereka secara aktif terlibat.

Misalnya, di Makasar Sulawesi Selatan, berdiri IMMIM (Ikatan Masjid Mushala Indonesia Mutahadiah) yang bergerak terutama pada pengembangan masyarakat melalui lembaga ibadah masjid dan mushala. Dalam hal ini IMMIM berusaha melakukan berbagai upaya advokasi pemberdayaan masyarakat dengan mengirim sejumlah nama yang akan menjadi penceramah dan pengkhotbah di masjid-masjid dan mushala di wilayah Sulawesi Selatan. Disamping itu juga diadakan pelatihan kepada para penceramah dan pengkhotbah tersebut. Lembaga ini pernah bekerjasama dengan Ausaid dalam penyuluhan dan training HIV/AIDS kepada para penceramah dan pengkhotbah. Masyarakat muslim Makasar juga mempunyai rencana menerapkan syariah Islam, maka pemerintah propinsi membentuk KPPSI (Komite Persiapan Penerapan Syariah Islam) yang bekerjasama dengan dosen-dosen IAIN, untuk menghindari radikalisme yang potensinya cukup besar di wilayah Makasar.

Dengan tampilnya para intelektual muslim ini pada tingkat tertentu, gerakan-gerakan yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat semakin memperoleh perhatian dari masyarakat. Dialog antara Islam dan modernitas semakin intensif dan produktif serta menunjukkan kemajuan, mereka sudah terbiasa dengan istilah-istilah dan konsep-konsep modern seperti *civil society*, demokrasi, dan hak asasi manusia semakin mendapat tempat di dalam setiap wacana keislaman yang mereka kembangkan.

Intelektual Muslim Sebagai Aktor Perubahan Sosial

Siapakah intelektual Muslim? Intelektual Muslim merupakan produk reformisme Islam yang menjadi fenomena utama Dunia Islam abad ke-20. Sebelumnya, Islam hanya mengenal ulama untuk menunjuk kalangan terpelajar Muslim. Ulama tidak hanya kelompok sosial terpelajar, lebih dari itu dalam dirinya juga melekat otoritas keagamaan (*religious authority*) yang merupakan hasil interaksi antara keterpelajarannya dan pengakuan masyarakat. Ulama biasanya mendapat pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang juga dipandang otoritatif oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ulama merupakan produk lembaga pendidikan tradisional pesantren, yang juga diasuh oleh ulama. Penting juga disebutkan bahwa Makkah dan Madinah (Haramain) merupakan dua tempat belajar utama yang memproduksi banyak ulama Indonesia. Tokoh-tokoh penting ulama Indonesia, seperti Kyai Hasyim Asy'ari[†] dan Kyai Ahmad Dahlan[‡], tercatat pernah belajar di Makkah.

Ulama biasanya bukan merupakan bagian struktural dari pemerintahan, tidak jarang ulama bersikap kritis dan menentang kebijakan pemerintah. Di masa lalu, ketika khalifah Abbasiyah pada abad ke-9 hendak menetapkan kekhalifahan sebagai otoritas final yang menentukan posisi teologis masyarakat, tantangan itu datang dari para ulama. Tidak heran jika Mottahedeh menyebut ulama sebagai cermin suara hati masyarakat. (Roy P. Mottahedeh: 1980). Dalam konteks masyarakat pra-modern ini, ulama sebenarnya telah memainkan peran sebagai intelektual. Seperti diketahui, intelektual merupakan kelompok kecil masyarakat terpelajar yang senantiasa mempertanyakan *status quo*, dan bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang digulirkan penguasa. "My kingdom is not in

[†] Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama), organisasi muslim tradisional Indonesia. Ia juga mendapat gelar Rais Akbar. Lahir di Jombang pada 14 Pebruari 1871 dan mendapat pendidikan Islamnya di Makkah setelah belajar di pesantren-pesantren Jawa Timur dan Madura. Ia berguru kepada ulama terkemuka *al-Haramain* pada masanya seperti Sheikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Sheikh Mahfudz al-Tirmizy. Ketika kembali ke Indonesia, ia mendirikan dan memimpin pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur.

[‡] Kyai Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah (1912). Ia lahir pada 1869 di Yogyakarta dengan nama kecil Muhammad Darwis. Ayahnya, Kyai Haji Abubakar bin Kyai Sulaiman, adalah *khatib* (penyampai khutbah Jum'at) di Masjid Sultan Yogyakarta sementara ibunya adalah putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah belajar agama, terutama *nahw* (tata bahasa Arab), *fiqh* dan *tafsir* di Yogyakarta, pada 1890 ia berangkat ke Makkah dan belajar di bawah bimbingan Sheikh Ahmad Khatib Minangkabau. Setelah kembali ke Indonesia, di samping berdagang –yang merupakan sumber ekonomi- ia menjalin relasi dengan banyak kalangan ulama pembaharu.

this word” yang diserukan Julien Benda pada 1920-an merupakan simbol bahwa intelektual juga tidak pernah didorong oleh kepentingan pribadi dalam melontarkan ”tugas-tugas intelektualnya”. (Julien Benda: 1969). Dengan berbagai perbedaan, dapat dikatakan bahwa ulama memiliki peranan sejajar dengan intelektual sekuler.

Namun, pada perkembangannya kemudian, peranan yang dimainkan ulama tidak selalu mencerminkan suara hati masyarakat. Posisi ulama yang seringkali muncul dari struktur pemerintahan menyebabkan ulama tidak memiliki independensi untuk menyampaikan aspirasinya. Kapasitasnya ulama yang hanya mengandalkan kewibawaan tradisional seringkali tidak mampu menampung aspirasi masyarakat modern yang semakin kompleks. Pada masa Turki Utsmani misalnya, ulama telah menjadi bagian dari institusi negara. Muncul kemudian istilah ulama resmi (*ulama-i resmiye*) sebagai lawan dari ulama tarekat (*ulama-i tariq*) yang bersifat independen. Pembagian seperti itu menyimbolkan bahwa sebagian ulama telah terkooptasi negara. Secara umum memang dapat dikatakan bahwa modernisasi yang berlangsung sejak abad ke-19 diberbagai belahan dunia Islam juga membawa efek kepada semakin merosotnya otoritas ulama.

Tidak heran jika sejak periode tersebut dunia Islam menyaksikan kritisisme terhadap ulama yang semakin besar. Menariknya, kritik itu tidak datang dari kelompok lain, tetapi justru datang dari kalangan ulama sendiri, terutama mereka yang mendukung tajdid (*Islamic reform*). Pada awal abad ke-19 di Afrika Barat misalnya, banyak kritik dialamatkan kepada para ulama yang bersikap kompromis terhadap praktik-praktik keagamaan lokal. Mereka menyebut para ulama tersebut sebagai kelompok *ulama su'* (ulama buruk), sebuah istilah yang datang dari al-Ghazali untuk menunjuk ulama yang berkolaborasi dengan penguasa. Kritik-kritik serupa yang terus dialamatkan kepada para ulama, bersamaan dengan semakin terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan secara massif, mendorong munculnya sebuah kelas baru dalam masyarakat muslim yang kemudian dikenal dengan intelektual muslim.

Intelektual muslim merupakan partner sekaligus saingan bagi ulama. Otoritas keagamaan tidak hanya mengalami fragmentasi, yang berarti gagasan-gagasan yang berkaitan kehidupan keagamaan tidak menjadi monopoli ulama,

lebih dari itu kelompok intelektual muslim kemudian berhasil membangun otoritas keagamaannya sendiri. Gaung tokoh-tokoh intelektual muslim yang menyerukan pembaruan Islam terbentang dari mulai Mesir, Turki, Benua India, sampai Asia Tenggara –termasuk Indonesia- memiliki pengikut dari kalangan yang pada umumnya juga berasal dari kelas terpelajar muslim. Intelektual muslim kemudian muncul sebagai aktor-aktor penting perubahan sosial dan keagamaan di seluruh dunia Islam.

Dalam konteks Indonesia, kehadiran intelektual muslim juga telah menjadi saingan bagi ulama. Munculnya istilah ‘kaum tua’ atau ulama yang mendukung *status quo* dan ‘kaum muda’ intelektual muslim yang ingin melakukan pembaruan, merupakan indikasi penting telah terjadinya ‘pergumulan dan perebutan pengaruh’ antara kedua kelompok tersebut di kalangan masyarakat. Sejak pertama kali muncul pada abad ke-19, kedua istilah itu masih tepat untuk menggambarkan persaingan antara ulama dan intelektual muslim Indonesia.

Pada kasus-kasus gerakan pembaruan pada masa Indonesia Orde Baru, persaingan-persaingan itu dapat dilihat misalnya, tentang lontaran-lontaran pembaruan Nurcholis Madjid dan reaksi-reaksi yang muncul dari kalangan penentangannya, yang sebagian diantaranya adalah ulama, menunjukkan bagaimana pergumulan itu masih terus berlangsung. Yang lebih kontemporer adalah gerakan Islam liberal yang mendapat tantangan keras dari kalangan konservatif. Para ‘ulama resmi’ yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa kontroversial yang antara lain mengharamkan liberalisme dan pluralisme. Melihat kondisi tersebut Hamid Basyaib, seorang aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), menyebut Islam Indonesia yang bersifat moderat hanya bersifat mitos belaka. (Hamid Basyib, 2005:10).

Sebagai kelompok sosial, intelektual muslim telah membawa perubahan sosial-keagamaan di Indonesia. Pandangan Esposito dan Voll bahwa intelektual muslim merupakan *”makers of contemporary Islam”* merupakan istilah yang tepat tidak hanya untuk menggambarkan intelektual muslim di dunia Islam, tetapi juga di Indonesia. (John L. Esposito dan John O. Voll: 2001) Dinamika kehidupan masyarakat muslim untuk masa-masa berikutnya, jelas tidak bisa dipisahkan dari peran intelektual muslim yang mulai menguat pada awal abad ke-20, meskipun

jelas pula bahwa ulama, kelompok-kelompok konservatif dan radikal tetap penting untuk mendapat perhatian.

Kemunculan Gerakan Sosial dan Dinamikanya

Dalam *Muslim Intellectual Response to "New Order" Modernization in Indonesia*, Muhammad Kamal Hasan, sarjana asal Malaysia, memberikan gambaran tentang kemunculan sebuah orientasi baru intelektual muslim Indonesia dalam berhadapan dengan penguasa. Kemunculan orientasi baru itu, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan-kebijakan modernisasi di bawah pemerintah Orde Baru. Panggilan untuk memberikan respon terhadap modernisasi tidak hanya mengkonsolidasi terbentuknya kelompok intelektual muslim generasi baru, bahkan juga memperkuat kesadaran di kalangan kelompok ini bahwa modernisasi secara substansial bagian dari Islam. (Muhammad Kamal Hasan: 1987).

Disebut kelompok intelektual muslim generasi baru karena secara substansial agenda perjuangannya berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Agenda perjuangan intelektual muslim Indonesia bergeser dari garis perjuangan yang mengusung formalisasi Islam dalam konteks negara Indonesia menuju perjuangan di bawah bendera Islam kultural. Kampanye Islam kultural ini secara kebetulan sejajar dengan kebijakan modernisasi Orde Baru. Disinilah kemudian terjadi simbiosis mutualisme antara intelektual muslim generasi baru dan Orde Baru. Generasi baru mengintensifkan dialog Islam dan modernisasi, sedangkan Orde Baru memberikan atmosfer sosiologis dan politis bagi semakin terintegrasinya Islam dan modernitas.

Orde Baru -seperti dikatakan banyak penulis- memang lebih memberikan prioritas terhadap program-program yang berorientasi praktis daripada ideologis. Orde Baru ingin menjalankan program yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang dikemas dalam konsep pembangunan (*development*) dan modernisasi (*modernization*). Langkah-langkah Orde baru ini juga dibarengi dengan berbagai kebijakan politik yang bertolak belakang dengan kebijakan politik pemerintah sebelumnya. Tema-tema seperti deideologisasi, deparpolitisasi, dan pragmatisasi merupakan pijakan Orde Baru dalam membangun kehidupan politik di Indonesia.

Pergeseran garis perjuangan intelektual muslim itu terjadi -dan semakin menguat-setelah pemerintah menolak rehabilitasi Masyumi menjelang pemilu 1971. Khawatir terhadap pengaruh tokoh-tokoh eks-Masyumi, pemerintah Orde Baru memilih untuk mendorong terbentuknya partai Islam baru dan aktor-aktor politik baru daripada merehabilitasi. Parmusi, sebagai partai politik baru, tetap tidak memuaskan intelektual muslim generasi lama seperti Muhammad Natsir, Muhammad Roem, Sjafrudin Prawiranegara dan sebagainya. Dalam situasi demikian, muncul jargon baru, 'Islam Yes, partai Islam No' yang disuarakan kalangan intelektual muslim kalangan baru di bawah semangat modernisasi Islam.

Dengan menyuarakan jargon tersebut, generasi baru intelektual muslim sebenarnya tidak mengkampanyekan sekulerisme. Mereka juga tidak hendak menolak sifat holistik doktrin Islam. Mereka hanya membuat perbedaan antara aspek-aspek sakral dan profan dalam Islam. Partai politik Islam mereka lihat sebagai aspek profan dalam agama, dan karenanya bukan sesuatu yang niscaya. Di samping itu, mereka juga meyakini proposisi bahwa Islam tidak mengatur semua segi kehidupan secara tegas dan terperinci. Islam hanya memberikan nilai-nilai moral yang berperan sebagai pedoman dasar dan umum bagi manusia. Posisi ini, seperti ditegaskan Effendy kemudian diartikulasikan dalam tema-tema 'desakralisasi', 'reaktualisasi', dan 'pribumisasi' Islam. Aspirasi politik Islam praktis mengalami kemerosotan sepanjang Orde Baru. (Bahtiar Effendy: 1998).

Penting diungkapkan disini bahwa kemunculan generasi baru intelektual muslim -yang mengusung tema-tema modernisasi- tidak dapat dipisahkan dari munculnya persepsi dikalangan intelektual sekuler tentang Islam Indonesia yang menguat pada periode awal Orde Baru. Terdapat keraguan dikalangan intelektual sekuler tentang dukungan Islam terhadap modernisasi. Di samping itu, sebagian mereka meremehkan kualitas dan kapabilitas para pemimpin muslim. Dalam konteks inilah kemudian muncul diskusi-diskusi intensif dikalangan intelektual muslim tentang modernisasi. Diskusi itu tidak hanya dimaksudkan sebagai respon terhadap isu modernisasi, tetapi juga sebagai bentuk penafsiran dan penjelasan intelektual muslim tentang makna modernisasi dalam Islam. Tokoh-tokoh muslim seperti Delier Noer, Omar Hashem, HM. Rasyidi, Nurcholish Majdid, dan Amien

Rais masing-masing menulis artikel yang bertemakan modernisasi dalam konteks umat Islam Indonesia.

Diskusi-diskusi yang berlangsung dikalangan intelektual muslim itu kemudian membentuk satu kesadaran baru dikalangan masyarakat muslim Indonesia, khususnya diperkotaan, yang meyakini pentingnya proses perubahan Indonesia menuju masyarakat modern. Kasus konkrit perubahan pemikiran ini antara lain dicirikan oleh tenggelamnya pemikiran ideologis dan politis serta meningkatnya kecenderungan pemikiran yang bersifat substansialis dan kultural. Pendekatan kultural berada di pusat, sedangkan pendekatan struktural-formal semakin terpinggirkan. Pergeseran dan perubahan ini selanjutnya mempengaruhi pola pemikiran keislaman kaum menengah kota, yang kemudian dikenal sebagai 'kelas menengah santri baru', sebuah kelompok masyarakat muslim yang tidak lagi memiliki ikatan ideologis dengan partai-partai Islam seperti kelompok-kelompok muslim sebelumnya.

Kelas menengah santri baru merupakan kalangan terpelajar Islam yang berdasarkan ketrampilan dan profesionalismenya, memiliki status sebagai kelas menengah. Mereka tidak melibatkan diri dalam politik Islam dan lebih menekankan aktivitasnya dalam kegiatan-kegiatan keislaman yang bersifat sosial dan kultural. Memang, sebagaimana dicatat Anwar, program-program pembangunan Orde Baru, termasuk sukses ekonomi yang dicapai, telah memberikan kesempatan besar kepada kelompok-kelompok muslim untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Pada gilirannya, pembangunan ekonomi Orde Baru bahkan berhasil memberi ruang yang lebih besar bagi proses mobilisasi massa muslim secara vertikal, dimana mereka semakin terintegrasi ke dalam kehidupan modern, dan akhirnya semakin intensif terlibat dalam proses sosial-politik dan kenegaraan di Indonesia. (M. Syafi'I Anwar: 1995). Terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kiranya tidak dapat dilepaskan dari proses-proses interaksi dan negosiasi antara intelektual muslim Indonesia dengan penguasa politik.

Penutup

Muncul dan berkembangnya kelompok –yang secara kolektif- disebut intelektual muslim di seluruh dunia Islam menandai sebuah babak baru dalam sejarah Islam. Intelektual muslim merupakan sebuah kelompok baru pemikir Islam yang berbeda dari ulama dan intelektual sekuler. Berbeda dengan ulama, kelompok intelektual muslim pada umumnya mendapatkan pendidikan di luar institusi-institusi pendidikan tradisional. Disamping itu, mereka juga melakukan reinterpretasi Islam dan menempatkannya dalam konteks modernitas dengan menggunakan pendekatan kesarjanaan modern. Mereka tidak hanya terlibat dalam diskusi-diskusi masalah ummat dalam ruang publik, tetapi juga memiliki komitmen untuk selalu bersikap kritis dan selalu menyelidiki implikasi moral dari modernitas.

Intelektual muslim, yang secara kolektif mulai menguat pada awal abad ke-20, menandai awal bangkitnya modernitas di dunia Islam. Pada periode ini, dunia Islam mengalami pergulatan dengan kolonialisme dan imperialisme yang menimbulkan berbagai implikasi. Pergulatan fisik melawan kolonialisme membuka kembali wacana tentang jihad dengan pemaknaan yang semakin beragam dan kompleks. Sementara itu, interaksi di tingkat budaya menimbulkan *culture exchange* yang tidak hanya menjadi latar belakang munculnya kelas intelektual muslim, tetapi juga memicu semangat dan gairah baru di kalangan mereka untuk mendialogkan Islam dengan nilai-nilai modernitas.

Dalam konteks Indonesia, dialog antara Islam dengan modernitas mulai berkembang secara intensif sejalan dengan kebangkitan dunia Islam secara umum. Muncul dan berkembangnya organisasi-organisasi muslim modernis dengan berbagai program yang bermuara pada konsep kemajuan Islam, semakin menempatkan kelompok intelektual muslim dalam arus utama perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini karena melalui organisasi-organisasi muslim modernis –dan lembaga-lembaga pendidikan Islam di bawahnya- mereka secara berkelanjutan bekerja untuk melakukan reformulasi dan reinterpretasi Islam dalam konteks meminjam istilah Nurcholish Madjid –keindonesiaan dan kemodernan-. Dalam konteks ini, sebutan bahwa Islam Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan Timur Tengah dalam pengertian lebih damai dan ramah, jelas tidak

dipisahkan dari kerja keras intelektual muslim melakukan kontekstualisasi doktrin Islam di Indonesia.

Jalan baru Islam, dari segi wacana, diskusi dan perdebatan yang berlangsung di kalangan kelompok intelektual muslim memasuki tema yang semakin luas dan beragam. Dari segi praktik, negara semakin membuka diri bagi penerapan konsep-konsep Islami seperti bank syariah dan penerapan syariah Islam, pada saat yang sama dari segi peta pengelompokan, semakin banyak kelompok-kelompok Islam yang muncul ke ruang publik dan semakin menguatnya kaum muslim salafi (radikal) Indonesia dalam kancah pergerakan Islam di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Moeslim. 2010. *Politik Umat Politik Pemberdayaan*. Makalah disampaikan pada Muhammadiyah Update, PSIF UMM, Malang, 26 Maret.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Basyaib, Hamid. 10 Agustus 2005. Mitos Moderasi Islam Indonesia. *Media Indonesia*
- Benda, Julien. 1969. *The Treason of the Intellectuals*. New York: Norton.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Eickelman, Dale F. dan John W. Anderson. 1999. Redefining Muslim Publics. Dalam Dale F. Eickelman and John W. Anderson (eds.). *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Bloomington: Indiana University.
- Esposito, John L. dan John O. Voll. 2001. *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Hasan, Muhammad Kamal. 1987. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*. Terj. Ahmadi Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Jabali, Fuad dan Arief Subhan. 2007. Intelektual Muslim dan Lahirnya Rumusan Baru Islam Indonesia. Dalam *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*. CSIS. Yogyakarta: Kanisius.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- Mottahedeh, Roy P. 1980. *Loyalty and Leadership in an Early Islamic Society*. Princeton: Princeton University Press.
- Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam pada Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.